

RESEARCH ARTICLE

Perancangan Interior Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi dengan Pendekatan Aktivitas

Santi Febrianti, Reza Hambali Wilman Abdulhadi* and Akhmadi

Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom, Bandung, 40257, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author: rezahwa@telkomuniversity.ac.id

Received on 04 September 2023; accepted on 04 October 2023

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan disuatu daerah atau wilayah. Sebagai instansi pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau disingkat BAPENDA mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah melalui pelayanan publik berupa pelayanan dan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan pada 34 kantor cabang BAPENDA yang disebut dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D), termasuk di Kota Sukabumi. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi memiliki tujuan untuk membangun *good governance* sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui dilakukannya pelayanan publik. Dengan fungsi utama kantor sebagai kantor pelayanan publik serta pengelolaan pendapatan daerah, maka diperlukannya kesesuaian ruang yang digunakan untuk masing – masing aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan pada hasil wawancara observasi, studi banding, studi literatur, dan studi preseden yang telah dilakukan, pada perancangan ini diterapkan pendekatan aktivitas dengan mengambil konsep FAST (*Efficient, Organize, Trustworthy*) sebagai solusi desain dari permasalahan yang telah ditemukan.

Key words: Aktivitas, Interior, Pajak Daerah, P3D Wilayah Kota Sukabumi

Pendahuluan

Pajak daerah merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan disuatu daerah atau wilayah. Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang tertera dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah merupakan perangkat pemerintah daerah untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan akan kepentingan pembangunan di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Diskominfo, perolehan pajak daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 memiliki kontribusi sebesar 60,4% yang merupakan pendapatan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Namun angka tersebut belum dapat mencapai target realisasi pajak, sehingga Gubernur Provinsi Jawa Barat – Ridwan Kamil dalam wawancara Kompas (2021) menuturkan bahwa perlu adanya optimalisasi potensi pajak guna mendukung program daerah sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sebagai instansi pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau disingkat BAPENDA mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah melalui pelayanan publik berupa pelayanan dan pengelolaan pajak

daerah yang dilakukan pada 34 kantor cabang BAPENDA yang disebut dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D), termasuk di Kota Sukabumi.

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi memiliki tujuan untuk membangun *good governance* sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui dilakukannya pelayanan publik. Maryam (2016) mengemukakan bahwa *good governance* dapat terwujud apabila dilakukannya optimalisasi fasilitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Apriana dan Suryanto (2010), sebagai upaya untuk meningkatkan potensi pajak, diperlukannya peran aktif daerah untuk meningkatkan hasil pendapatan dan pengelolaan pajak daerah dengan dilakukannya pemerataan fasilitas layanan publik. Terlebih di era otonomi daerah seperti saat ini, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam memenuhi fasilitas – fasilitas pelayanan publik yang dapat mendukung peningkatan pendapatan.

Namun, berdasarkan pada hasil studi kasus yang telah dilakukan pada Kantor P3D Wilayah Kota Sukabumi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu terdapat ketidaksesuaian pemenuhan fasilitas publik dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, ditemukan permasalahan lainnya yaitu ketidaksesuaian pengaturan organisasi ruang kantor dengan alur

aktivitas kerja yang dilakukan dari masing – masing sub bagian. Permasalahan tersebut berakibat pada sulitnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar masing – masing staff. Maka dari itu, agar dapat mengakomodasi dan menunjang tiap – tiap aktivitas yang dilakukan pada lingkungan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi diterapkan pendekatan aktivitas pada perancangan ini.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada penjelasan yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik merupakan aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai suatu upaya untuk dapat memenuhi kepentingan penerima maupun penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Keberhasilan suatu pelayanan publik diukur berdasarkan pada tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan harapan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat prinsip – prinsip yang hendaknya dilakukan, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut.

1. **Kesederhanaan**
Prosedur yang dilaksanakan pada proses pelayanan publik mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.
2. **Kejelasan**
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan.
 - b. Unit kerja petugas yang berwenang memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan pelayanan.
 - c. Rincian dan tata cara pembayaran pelayanan.
3. **Kepastian Waktu**
Menyelesaikan proses pelayanan dengan kurun waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. **Akurasi**
Pelayanan publik yang diberikan bersifat benar, tepat, dan sah.
5. **Keamanan**
Pelayanan publik yang diberikan memberikan rasa aman dan hukum yang pasti.
6. **Tanggung Jawab**
Pemimpin bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat menyelesaikan keluhan.
7. **Kelengkapan Sarana dan Prasana**
Dapat terfasilitasinya sarana dan prasana yang dapat memadai dan mendukung proses pelayanan, termasuk sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. **Kemudahan Akses**
Tempat serta sarana pelayanan memadai, mudah untuk diakses, dan memanfaatkan teknologi.
9. **Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan**
Penyedia pelayanan publik bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah.
10. **Kenyamanan**
Area pelayanan tertib dan teratur, dengan disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, dan rapi. Dapat terlengkapannya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti parkir, toilet, dan tempat ibadah.

Selain itu, dijelaskan juga bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu adanya upaya untuk menyediakan sarana, prasarana, dan kemudahan akses pelayanan bagi difabel, lansia, ibu hamil, dan juga balita.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berikut ini merupakan tahapan pengumpulan yang dilakukan :

1. Pengumpulan Data

- a. **Wawancara**
Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi secara langsung sehingga dapat diketahui situasi dan kondisi yang memiliki keterkaitan dengan proses perancangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait untuk mengetahui kebutuhan dan persepsi pengguna terhadap ruangan. Data – data yang di dapatkan dari hasil wawancara ini digunakan sebagai objek analisis hal – hal yang berkaitan dengan perancangan.
- b. **Observasi**
Berdasarkan pemaparan Akhmadi (2017), observasi dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengamatan pada objek desain berupa kondisi sekitar eksisting dan aktivitas pengguna ruang yang terjadi di dalamnya sehingga di dapatkan informasi yang valid. Proses observasi dilakukan secara langsung pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi yang berlokasi di Jalan Masjid No. 22, Cikole, Gunung Parang, Kota Sukabumi, Jawa Barat untuk di analisis lebih lanjut yang kemudian memunculkan permasalahan – permasalahan desain sebagai pertimbangan dalam proses perancangan.
- c. **Studi Literatur**
Studi literatur merupakan proses dalam mencari informasi dan referensi berupa teori yang relevan dengan perancangan ulang Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Sukabumi. Informasi dan referensi tersebut di dapatkan melalui jurnal, tesis, artikel, buku, situs internet yang memiliki sumber terpercaya dan aturan – aturan atau standar perancangan yang sudah ditetapkan.

2. Analisa Data

Analisa data ialah proses yang selanjutnya dilakukan setelah data – data terkait dengan penelitian dikumpulkan. Hasil dari analisa data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam penentuan konsep perancangan yang akan diterapkan.

3. Menentukan Konsep

Konsep perancangan ditentukan berdasarkan pada hasil pengumpulan data yang telah dilakukan.

4. Pengaplikasian Konsep

Konsep yang telah dipilih kemudian diaplikasikan pada perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, sehingga permasalahan – permasalahan yang ditemukan dapat terselesaikan.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan Desain

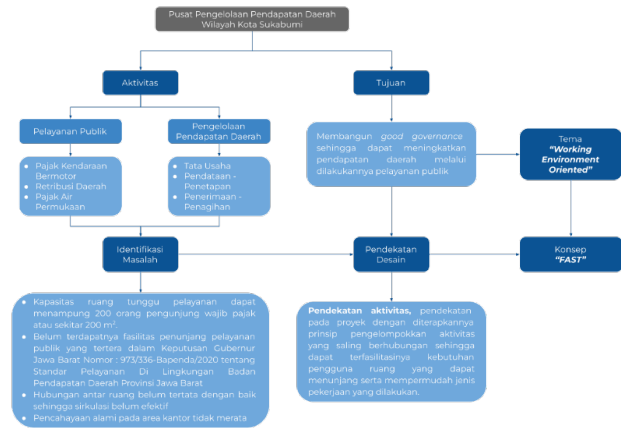
Pendekatan desain yang digunakan pada perancangan ini menggunakan pendekatan aktivitas. Berdasarkan pada pemaparan yang disampaikan oleh Widodo (2016), pada perancangan ruang interior, pendekatan aktivitas ialah pendekatan pada proyek dengan diterapkannya prinsip pengelompokan aktivitas yang saling berhubungan sehingga dapat terfasilitasinya kebutuhan pengguna ruang yang dapat menunjang serta mempermudah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna ruang. Maka dari itu dalam penerapannya perlu diketahui terlebih dahulu user atau pengguna ruangan, serta jenis kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan penggunaannya.

Menurut Bakker (2016), terdapat beberapa kebutuhan pengguna kantor ketika sedang melakukan aktivitas kerja pada workspace atau stasiun kerja, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

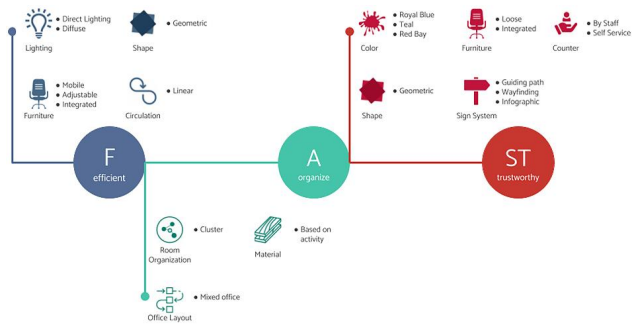
1. **Interaksi**
Diperlukannya aktivitas yang saling berintegrasi atau dilakukan secara kelompok antara satu individu dengan individu lainnya.
2. **Kedekatan**
Suatu aktivitas yang dilakukan sebaiknya berdekatan dengan aktivitas yang lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dilakukan.
3. **Stimulasi**
Beberapa pekerja memerlukan area kerja yang tenang dan jauh dari gangguan. Dan beberapa lainnya memerlukan aktivitas kerja yang membutuhkan interaksi dengan orang lain.
4. **Keamanan**
Faktor keamanan tidak hanya bergantung pada teknis seperti seगतan listrik dan kecelakaan kerja, tetapi juga pada tata letak area kerja yang mudah untuk dilakukan pengawasan.
5. **Daerah Kekuasaan**
Daerah kekuasaan suatu area kerja tidak hanya berkaitan secara individual, namun juga berkaitan dengan hierarki pada suatu tim atau divisi tertentu pada kantor.
6. **Sirkulasi**
Pembentukan rute sirkulasi pada suatu kantor bergantung peran pekerja dan bidang kerja yang dilakukan, prioritas kerja, dan jalur yang dilewati.
7. **Mobilitas**
Mobilitas merupakan kebebasan dan penghalang pergerakan. Dalam perancangan suatu area kerja, perlunya diperhatikan kebebasan pegawai yang memungkinkan untuk melakukan pergerakan.

Hadiansyah (2017), menjelaskan bahwa pada suatu ruang pelayanan publik, elemen – elemen pengisi ruang interior sebaiknya disusun sesuai dengan kebutuhan yang saling berintegrasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas sehingga crowd dan density dapat dihindari. Sedangkan Shao (2019) memaparkan bahwa pada perencanaan ruang publik yang memiliki kegiatan pelayanan, perlu adanya pertimbangan pada kebutuhan dan jenis aktivitas pelayanan publik serta prosedur pelayanan yang harus dilalui. Tidak hanya itu, dalam perancangan area pelayan publik, sebaiknya ruangan di desain yang dapat membuat masyarakat pengguna pelayanan publik dapat lebih mandiri. Perlu diingat bahwa pengguna layanan publik tidak hanya terbatas pada orang dewasa saja, pada beberapa pelayanan publik juga digunakan oleh orang lanjut usia serta difabel.

1. **Pengguna Layanan Publik Lanjut Usia (Lansia)**
Walaupun dalam segi jumlah tidak sebanyak pengguna layanan dengan usia dewasa produktif, namun perencanaan ruang publik bagi lansia sebaiknya tetap diperhatikan.
2. **Pengguna Layanan Publik dengan Keterbatasan Fisik (Difabel)**
Untuk menciptakan ruang dan pelayanan publik yang setara, maka sebaiknya dapat terpenuhinya fasilitas ramah difabel.
3. **Prinsip Ruang Pelayanan Publik**
 - a. **Prinsip fungsional**, yaitu ruang publik yang digunakan dibedakan berdasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan.
 - b. **Prinsip ekonomi**, yaitu perencanaan ruangan publik yang digunakan oleh masyarakat secara general, sehingga ruangan pelayanan tidak di desain seadanya atau didesain terlalu mewah.
 - c. **Prinsip pemilihan material**, penggunaan material dengan mempertimbangkan jenis aktivitas, jumlah pengguna, dan keberlanjutan untuk digunakan kedepannya.



Gambar 1. Mind Map Tema dan Konsep Perancangan



Gambar 2. Mind Map Konsep Perancangan

- d. **Prinsip kemudahan informasi**, dengan dibuatnya desain ruang publik yang memberikan kemudahan dalam memberikan informasi maka aktivitas pelayanan yang dilakukan akan lebih cepat, tepat, dan efisien.

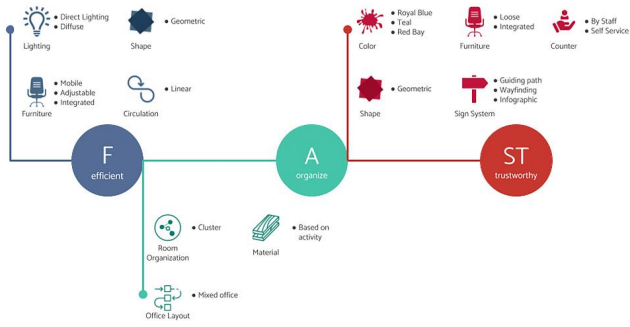
Tema Perancangan

Berdasarkan pada mindmap di atas, pemilihan tema yang akan diterapkan pada perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi adalah *Working Environment Oriented*. Pemilihan tema perancangan tersebut dengan mempertimbangkan fungsi utama kantor yang merupakan kantor bidang pengelolaan pendapatan daerah yang memfasilitasi pelayanan publik, sehingga diperlukannya kesesuaian ruangan yang dapat mengakomodasi masing-masing kegiatan yang dilakukan.

Konsep yang digunakan pada perancangan interior yang diambil ialah FAST. FAST merupakan sebuah singkatan yang diambil dari *Efficient, Organize, Trustworthy*. Konsep tersebut diambil berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan, jenis aktivitas yang dilakukan, visi misi instansi, dan tujuan dari Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi. Sehingga dalam penerapannya memerlukan ruang interior yang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas kantor agar pelayanan publik dan pekerjaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan cepat dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Implementasi Konsep Efficient

Penerapan konsep efficient pada perancangan diterapkan dengan memberikan kemudahan dalam mendukung aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada kantor. Sehingga dapat diselesaikan dengan



Gambar 3. Penerapan Konsep Efficient

tepat, cermat, namun dengan waktu yang singkat dan hasil kerja yang memuaskan.

Pada ruangan yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi, seperti pada ruang kerja staff, ruang rapat, dan loket pelayanan, pencahayaan buatan yang diaplikasikan berupa louver LED panel. Pemilihan louver LED panel dipilih karena mempertimbangkan sifatnya yang dapat menyebarkan cahaya, maka dari itu pencahayaan pada ruangan dapat lebih merata dan tidak memberikan efek silau. Sehingga dapat membantu pegawai lebih fokus ketika sedang melakukan pekerjaannya.

Disamping itu, pada area loket pelayanan, digunakan jenis mobile furniture agar dapat memudahkan pergerakan dan mobilisasi petugas, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat. Untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, digunakan konsep integrated furniture berupa penyusunan meja kerja pada area loket pelayanan yang saling berintegrasi satu dengan lainnya, agar proses distribusi dan verifikasi berkas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan teratur.

Pemilihan bentuk geometris pada perancangan mempertimbangkan agar dapat membuat suasana ruang interior kantor yang lebih terkesan professional, tegas, dan stabil. Disamping itu, penggunaan bentuk – bentuk geometris pada ruangan dapat lebih fungsional dan efisien, karena bentuknya yang menyesuaikan dengan fungsi ruang.

Sedangkan penerapan sirkulasi linear pada perancangan bertujuan untuk menghindari alur kerja yang saling bersilangan atau alur kerja mundur. Sehingga alur dari masing – masing aktivitas baik aktivitas pelayanan maupun aktivitas kerja pegawai dapat berjalan maju, efektif, dan efisien.

Implementasi Konsep Organize

Penerapan konsep organize pada perancangan diterapkan melalui pengelompokkan ruang – ruang interior pada kantor yang berdasarkan kesamaan jenis pekerjaan dan kedekatan ruang dengan aktivitas ruang yang saling berhubungan. Dengan demikian maka penggunaan material dan treatment pada ruangan juga harus diperhatikan sesuai dengan aktivitas dan fungsi ruang.

Layout yang diaplikasikan pada perancangan menerapkan jenis organisasi ruang cluster. Ruangan – ruang tersebut dikelompokkan berdasarkan pada jenis aktivitas yang saling berhubungan dengan memperhatikan jenis dan hubungan kerja. Tujuannya adalah agar alur kerja dapat bergerak maju sehingga lebih efektif dan efisien.

Sedangkan penerapan konsep tata ruang kantor yang diterapkan menggunakan konsep tata ruang mixed office dan cubicle type office. Mixed office yang merupakan konsep tata ruang kantor yang menggabungkan antara tata ruang kantor berkamar dengan tata ruang kantor terbuka, diaplikasikan pada area kerja staff. Konsep tata ruang kantor tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi antara kepala sub bagian dan kepala seksi pada masing – masing bidang kerja



Gambar 4. Penerapan Konsep Organize



Gambar 5. Cubicle Type Office

dengan staffnya. Ruang kerja masing – masing kepala sub bagian dan kepala seksi diberi material berupa tempered glass, yang menghadap langsung ke area kerja staff. Selain memudahkan koordinasi, pemasangan tempered glass tersebut berfungsi untuk memudahkan pengawasan antara atasan dengan pegawainya.

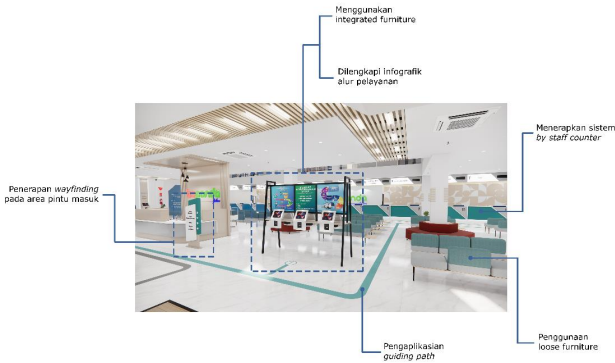
Sedangkan untuk tata ruang kantor cubicle type office diterapkan pada ruang kerja Kepala Pusat dan ruang kerja kepengurusan kendaraan bermotor, seperti Ruang Kanit Regiden Polri, Ruang Jasa Raharja, Ruang BAUR STNK, Ruang BPKB, dan Ruang Fiskal. Penerapan cubicle type office pada ruang – ruang tersebut mempertimbangkan hierarki dan aktivitas pengguna ruang yang mengurus dokumen – dokumen penting yang bersifat krusial dan rahasia. Sehingga memerlukan privasi yang lebih tinggi dibanding ruang kerja lainnya.

Konsep material yang dipilih pada perancangan selain menyesuaikan jenis aktivitas yang dilakukan pada ruangan, juga mempertimbangkan segi keamanan juga perawatannya. Pada ruangan – ruangan publik, material yang digunakan bersifat kuat, tahan lama, dan mudah dalam perawatannya. Dalam hal keamanan, pemilihan material yang tidak licin, tidak tajam, dan juga tidak menimbulkan racun. Untuk ruangan – ruangan yang membutuhkan tingkat suara minim dan menghindari kebocoran suara, seperti pada ruangan kerja diaplikasikan material sebagai berikut:

1. Menerapkan material dinding panel akustik
2. Menggunakan rubber base pada kaki furniture
3. Menerapkan material lantai berupa vinyl
4. Menggunakan acoustic laminated glass
5. Menggunakan WPC baffle acoustic pada koridor untuk menahan suara

Implementasi Konsep Trustworthy

Penerapan konsep trustworthy pada perancangan diterapkan dengan cara menciptakan lingkungan yang dapat membangun kepercayaan



Gambar 6. Penerapan Konsep Trustworthy

masyarakat akan kinerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, hal tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan kemudahan informasi serta fasilitas penunjang layanan publik.

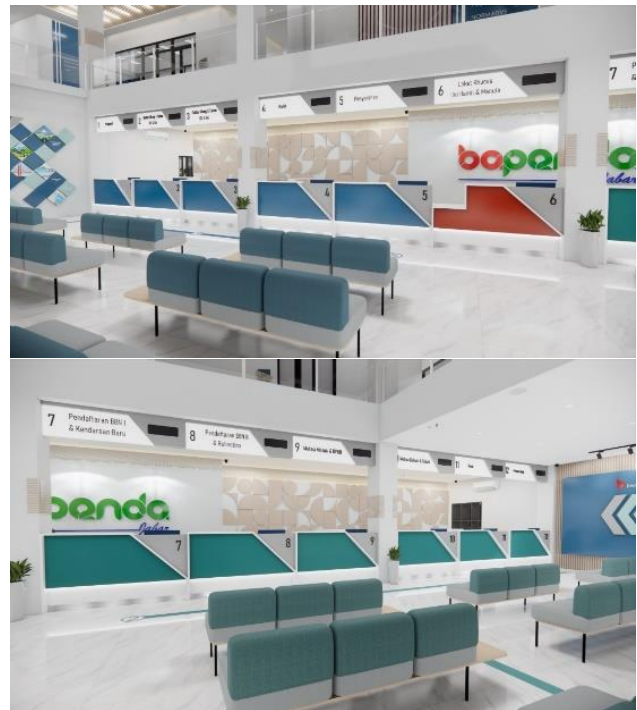
Pada area tunggu pelayanan pajak kendaraan bermotor, kursi tunggu dilengkapi dengan side table yang berfungsi sebagai tempat menyimpan berkas ketika wajib pajak sedang menunggu antrian pelayanan. Selain itu, konsep integrated furniture diterapkan pada penggunaan digital form kiosk yang dilengkapi dengan infografis, sehingga selain bertujuan untuk mempermudah proses pengisian formulir, juga memberikan penyampaian mengenai alur pelayanan kepada wajib pajak sebagai pengguna layanan publik.

Signage yang digunakan pada perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi berupa penunjuk arah ditempatkan pada area – area yang mudah untuk terlihat. Seperti pada area informasi yang berada dekat dengan pintu masuk. Selain itu, pada area pintu masuk juga diaplikasikan guiding path pada ruang pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan color code yang berbeda dan diberikan keterangan angka secara beraturan sesuai dengan tahapan – tahapan pelayanan publik. Selain itu, diterapkan juga lighting sebagai orientasi penunjuk arah pada ceiling ruang tunggu pelayanan. Dengan demikian maka dapat membantu wajib pajak untuk melakukan pelayanan sesuai dengan alur secara mandiri tanpa bantuan petugas.

Konsep penataan loket pelayanan pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Sukabumi disusun berdasarkan jenis aktivitas pelayanan yang tertera dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yaitu pelayanan pajak dan non pajak untuk kendaraan bermotor. Maka dari itu, untuk memudahkan pelayanan sehingga lebih optimal, efisien dan efektif, serta sebagai pencegahan penumpukkan wajib pajak, penyusunan loket terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan pajak dan non pajak, serta disediakan loket khusus untuk ibu hamil, manula, dan diffable. Loket pelayanan tersebut diberikan warna yang berbeda agar dapat dibedakan dengan mudah.

Disamping itu, sebagai salah satu inovasi agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien, difasilitasi loket dengan sistem self service untuk pelayanan pajak kendaraan 1 tahunan. Loket self – service tersebut memungkinkan wajib pajak sebagai pengguna layanan untuk pembayaran pajak secara mandiri.

Pemilihan warna yang diaplikasikan pada interior Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi mempertimbangkan suasana yang terkesan formal, tegas, dan professional sesuai dengan fungsi dan aktivitas utama kantor sebagai kantor pemerintahan yang bergerak pada bidang pendapatan daerah yang melayani pelayanan publik. Pemilihan warna – warna tersebut diantaranya adalah *white, royal blue, teal, moth wing, pewter grey, dan red bay*.



Gambar 7. Loket Pelayanan By Staff



Gambar 8. Loket Pelayanan Self Service



Gambar 9. Penerapan Warna Perancangan

Kesimpulan

Perancangan interior Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Sukabumi ialah solusi desain yang menjadi gagasan penulis dengan melihat adanya fenomena good governance dan revitalisasi sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, mengenai Standar Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah didapat dari hasil penelitian, maka didapatkan bahwa penerapan interior kantor dengan pendekatan aktivitas merupakan solusi desain dari berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada perancangan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, menerapkan konsep FAST (*Efficient, Organize, Trustworthy*) yaitu dengan menciptakan lingkungan kantor yang *efficient, organize, dan trustworthy*. Konsep FAST yang diterapkan menunjukkan bahwa desain kantor pemerintahan yang bergerak pada bidang pendapatan daerah dan pelayanan publik yang berorientasi pada jenis aktivitas yang dilakukan merupakan hal yang utama. Hal tersebut dapat dicapai melalui penerapan pada elemen – elemen desain serta interior. Sehingga aktivitas masing – masing pengguna dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Daftar Pustaka

1. Akhmedi. Desain Interior Perpustakaan Universitas Darul Ulum Jombang dengan Nuansa Masjidil Haram dan Edukatif. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 2017.
2. Apriana D, Suryanto R. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali). Jurnal Akuntansi dan Investasi. 2010 January;11(1):68–79.
3. Bakker ML. Space Planning for Commercial Office Interiors. New York: Bloomsbury Publishing; 2016.
4. Barat DPJ. Persentase Target Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020;. Available from: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/persentase-target-penerimaan-badan-pendapatan-daerah-provinsi-jawabarat-tahun-2019-2020>.
5. Hadiansyah MN. Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas dalam Ruang Pelayanan Publik Studi Kasus: BPJS Kesehatan Cabang Utama Bandung. Jurnal Desain Interior. 2017;2(1):27-42.
6. Maryam NS. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 2016 June;VI(1).
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 2003.
8. Nuralita Rezqiana A. Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemprov Jabar Luncurkan "Bapenda Kapendak". KOMPAS. Available from: <https://regional.kompas.com/read/2021/12/30/20141021/tingkatkan-pendapatan-daerah-pemprov-jabar-luncurkanbapenda-kapendak?page=all>.
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/336-Bapenda/2020 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; 2020.
10. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2009.
11. Shao F. Interior Space Design of Community Activity Center Based on Service Function. Open Journal of Social Science. 2019;7:209-14.
12. Widodo RS. LTP Rumah Susun Kontainer Di Semarang [Tugas Akhir]; 2016.